

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Johan Galtung mengkonsep makna damai sebagai suatu kondisi internal manusia yang memiliki pikiran damai terhadap dirinya sendiri ketika dihadapkan pada situasi tertentu.¹ Dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keberagaman, toleransi antar sesama merupakan pondasi untuk mencapai situasi yang damai, karena keberagaman sendiri dapat menjadi persoalan bagi timbulnya konflik apabila tidak diiringi dengan toleransi yang baik dalam hubungan antara masyarakat.²

Toleransi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.³ Sebaliknya, intoleransi dapat menjadi faktor utama penyebab konflik atau kekerasan kultural seperti yang di sebutkan Galtung, yakni kekerasan kultural merupakan tindakan kekerasan secara langsung maupun struktural yang dijustifikasi atau dilegitimasi atas dasar aspek kultural yang ada seperti ideologi, agama, bahasa dan seni.⁴ Intoleransi pada akhirnya akan berujung pada radikalisme.

¹ Agus Supriyanto, *Skala Karakter Toleransi: Konsep dan Operasional Aspek Kedamaian, Menghargai Perbedaan dan Kesadaran Individu*, Jurnal Ilmiah Counsellia, Vol. 7 No. 2, November 2017, hlm. 64

² Nur Khamid, *Bahaya Radikalisme terhadap NKRI*, Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 127

³ KBBI, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/toleransi>, 8 Agustus 2018

⁴ Johan Galtung, *Cultural Violence*, Journal of Peace Research, Vol. 27, No. 3, 1990, hlm. 291

Radikalisme merupakan bentuk intoleransi yang muncul dari respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, respon tersebut diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan.⁵ Tindakan radikal biasanya menggunakan cara yang revolusioner, yakni menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrim.⁶ Dapat disimpulkan bahwa Radikalisme merupakan suatu paham atau sikap (radikal) yang menginginkan perubahan terhadap sesuatu yang ada atau *status quo* dengan jalan menghancurkan *status quo* secara total dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, dan berbeda dengan sebelumnya.

Radikalisme dan sikap radikal pada dasarnya terjadi karena adanya ketimpangan baik dalam segi sosial, politik, dan ekonomi.⁷ Berdasarkan survey yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2017 mengenai radikalisme di institusi pendidikan, sebanyak 54,35% guru dan dosen serta 48,04% siswa dan mahasiswa berpendapat bahwa secara ekonomi orang non-muslim lebih diuntungkan dibandingkan orang muslim.⁸ Dari data tersebut, terlihat adanya ketimpangan dan ketidakadilan yang dirasakan suatu kelompok. Ketimpangan ini dapat memicu terjadinya radikalisme, seperti penjabaran diatas bahwa radikalisme timbul karena adanya ketimpangan.

⁵ Andang Sunarto, *Dampak Media Sosial Terhadap Paham Radikalisme*, Nuansa, Vol. X, No. 2, Desember 2017, hlm. 129

⁶ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 132

⁷ Nur Khamid, *Bahaya Radikalisme terhadap NKRI*, Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 139

⁸ PPIM UIN Syarif Hidayatullah, *Api Dalam Sekam: National Survey on Radical Islamic Movement in Schools and Universites*, Tangerang Selatan: PPIM, 2017

Masuknya paham radikal dan intoleransi salah satunya karena dampak negatif dari penggunaan sosial media, dimana rujukan pemahaman generasi muda mengenai agama Islam 50,89% berasal dari media sosial yang mempengaruhi pandangan mereka tentang jihad, toleransi, dan penerapan syariat islam.⁹ Survey yang dilakukan oleh PPIM tersebut juga menyebutkan bahwa 37,71% responden setuju bahwa jihad adalah “*qital*” dan terutama ditujukan melawan non muslim, serta aksi teror bom bunuh diri merupakan jihad Islam.¹⁰

Selain melalui media sosial, paham radikalisme juga menyebar melalui lembaga pendidikan. Survey mengenai pergerakan radikal Islam di sekolah dan universitas, melaporkan bahwa 48,95% siswa dipengaruhi untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama selain Islam dari buku ajaran di sekolah.¹¹ Dikutip dari pernyataan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menyatakan bahwa hampir seluruh perguruan tinggi di pulau Jawa sudah dimasuki paham radikalisme.¹² Hal serupa juga diakui oleh rektor Universitas Brawijaya, mengenai adanya kelompok radikal di kampus mereka yang bergerak secara tertutup dan merekrut mahasiswa sebagai anggota.¹³ Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa paham radikalisme agama begitu rentan masuk melalui doktrin dalam dunia pendidikan, dan tentunya akan merugikan bagi Indonesia.

⁹ PPIM UIN Syarif Hidayatullah, *Api Dalam Sekam: National Survey on Radical Islamic Movement in Schools and Universites*

¹⁰ PPIM UIN Syarif Hidayatullah, *Api Dalam Sekam: National Survey on Radical Islamic Movement in Schools and Universites*

¹¹ PPIM UIN Syarif Hidayatullah, *Api Dalam Sekam: National Survey on Radical Islamic Movement in Schools and Universites*

¹² TVOne, *Radikalisme Masuk Kampus*, diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=wrZRMH_6swg&t=320s, pada 14 September 2018

¹³ KompasTV, *Rektor Brawijaya Akui Adanya Kelompok Radikal di Kampus*, diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=j-VLhIGx2I>, pada 14 September 2018

Radikalisme memiliki dampak negatif terhadap Indonesia diantaranya pada bidang ekonomi, hal ini dapat mengganggu investasi asing di Indonesia. Staf ahli wakil presiden RI Sofjan Wanandi mengatakan, potensi hadirnya gerakan radikal dan berkembangnya isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) berdampak pada pertumbuhan investasi.¹⁴ Dalam bidang politik, radikalisme agama yang terjadi di Indonesia memiliki dampak besar terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena kelompok atau organisasi keagamaan radikal seperti salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menginginkan perubahan mendasar terhadap masyarakat dan sistem negara.¹⁵ Bagi bangsa Indonesia sendiri hadirnya persoalan seperti ini merupakan permasalahan yang mendasar bagi keberagaman di Indonesia, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa radikalisme merupakan bentuk intoleransi yang artinya bertentangan dengan semboyan bangsa Indonesia 'Bhinneka Tunggal Ika'.¹⁶

Paham radikalisme dan intoleransi yang ada di Indonesia telah berdampak terhadap timbulnya permasalahan terorisme dan juga konflik di tengah masyarakat, seperti pada kasus bom Bali dan juga bom di Hotel J.W Warriot yang merupakan bentuk radikalisme ideologi yang mengatasnamakan agama dan menentang modernitas.¹⁷ Konflik etnis di Sampit, Kalimantan Tengah, merupakan salah satu

¹⁴ Kristian Erdianto, *Isu SARA dan Radikalisme Berpengaruh Buruk pada Investasi*, KOMPAS, <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/23/23013271/isu.sara.dan.radikalisme.berpengaruh.buruk.pada.investasi>, diakses pada 10 Agustus 2018

¹⁵ M. Thoyyib, *Radikalisme Islam Indonesia*, TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 94-95

¹⁶ Nur Khamid, *Bahaya Radikalisme terhadap NKRI*, Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 128

¹⁷ M. Thoyyib, *Radikalisme Islam Indonesia*, TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 97

contoh bagaimana intoleransi dan radikalisme menjadi pemicu konflik antar etnis.¹⁸ Kesalahan dalam memaknai agama merupakan sumber lahirnya intoleransi dan radikalisme yang mengikutsertakan agama. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa agama juga berkontribusi besar terhadap *peacebuilding* yang dalam beberapa kasus, agama berperan signifikan dalam membantu mencegah, melakukan mediasi, dan menyelesaikan sebuah konflik.¹⁹ Permasalahan terorisme dan konflik yang terjadi di Indonesia menggerakkan *United Nations Development Programme* (UNDP) yang merupakan organisasi internasional yang fokus dalam membantu negara memberantas kemiskinan, pengurangan ketidaksetaraan dan diskriminasi untuk turut mengambil peran.²⁰

UNDP memiliki beberapa fokus utama, salah satunya *Democratic Governance and Peace Building* yakni *Preventing Violent Extremism* (PVE). Mulai tahun 2014, UNDP telah berupaya untuk melakukan pengembangan yang lebih dalam untuk memahami ekstrimisme kekerasan (*violent extremism*), diantaranya mengatasi peningkatan ekstrimisme kekerasan, menggunakan pendekatan pembangunan dan *peacebuilding* yang dengan kuat didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, dan kebutuhan untuk mengatur masyarakat yang semakin beragam dan multikultural, yang memerlukan perhatian terhadap institusi, ideologi politik dan agama, serta

¹⁸ Rinchi Andika Marry dan Mohammad Iskandar, *Konflik Etnis antara Etnis Dayak dan Etnis Madura di Sampit dan Penyelesaiannya (2001-2006)*, Depok: UI, 2014, hlm. 3-4

¹⁹ Reza Kavosh, *Religious Terrorism*, *Andalas Journal of International Studies*, Vol. 1 No. 2, 2012, hlm. 153

²⁰ UNDP, *About Us*, diakses melalui <http://www.undp.org/content/undp/en/home/about-us.html>, 11 Agustus 2018

promosi pendekatan yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).²¹ Upaya UNDP dalam PVE pada dasarnya adalah penguatan kohesi atau kepaduan vertikal dan horizontal dalam masyarakat seperti membantu aktor lokal menguatkan ketahanan mereka terhadap konflik dan perpecahan.²²

Berdasarkan *Secretary-General's Plan of Action to Prevent Violent Extremism* dan poin SDG 16, UNDP telah mengembangkan rangkaian strategi komprehensif dalam bentuk *framing paper* “*Preventing Violent Extremism through Inclusive Development and the Promotion of Tolerance and Respect Diversity*” yang merupakan rencana program global empat tahun pertama (2017-2020).²³ Dalam *framing paper* tersebut, strategi UNDP diagendakan akan dilakukan pada level regional dan negara, UNDP akan membantu merancang strategi di tingkat regional, sub-regional, nasional, dan sub-nasional untuk mencegah ekstrimisme kekerasan, diantaranya rencana program tersebut adalah *policy dialogues*, *program support*, *lessons learned*, dan *PVE grants mechanism*.²⁴

Pengimplementasian program PVE sudah dimulai sejak tahun 2016, dimana UNDP mengorganisir dialog kebijakan global mengenai PVE dan melakukan *regional workshop* di berbagai negara, salah satunya di Jakarta (Indonesia).²⁵ UNDP di Indonesia bekerjasama dengan PPIM UIN Syarif Hidayatullah dalam

²¹ UNDP, *Preventing Violent Extremism*, diakses melalui <http://www.undp.org/content/undp/en/home/democratic-governance-and-peacebuilding/preventing-violent-extremism.html>, 11 Agustus 2018

²² UNDP, *Preventing Violent Extremism*

²³ UNDP, *Preventing Violent Extremism*

²⁴ UNDP, *Preventing Violent Extremism through Inclusive Development and the Promotion of Tolerance and Respect Diversity*, New York: UNDP, 2016, hlm. 37-38

²⁵ UNDP, *Preventing Violent Extremism through Inclusive Development and the Promotion of Tolerance and Respect Diversity*, hlm. 37-38

mengimplementasikan program PVE melalui proyek Convey, dimana tujuan proyek ini adalah meningkatkan peran pendidikan dalam melawan ekstrimisme kekerasan di Indonesia.²⁶

Proyek ini dijalankan dalam rentan waktu satu tahun, yakni dari Maret 2017 hingga Maret 2018, dan berdasarkan keterangan Convey menyatakan bahwa proyek ini berhasil memberikan banyak pengetahuan yang signifikan, diantaranya adalah sikap dan perilaku keagamaan baik siswa maupun guru dan mahasiswa, serta memberikan rekomendasi dalam melaksanakan kegiatan pencegahan tindakan kekerasan ekstremisme yang lebih efektif, meningkatkan kesadaran tentang bahaya tindakan kekerasan ekstrimisme dan peran komunitas pendidikan dalam mencegahnya.²⁷ Penelitian ini akan menjelaskan tentang fenomena radikalisme agama yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan dan bagaimana upaya UNDP melalui Convey Indonesia dalam mengatasi radikalisme agama di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Radikalisme di Indonesia umumnya didasari oleh isu agama. Radikalisme terjadi karena adanya ketimpangan baik dalam segi sosial, politik, dan ekonomi. Radikalisme terbentuk dari respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, respon tersebut diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan. Beberapa tahun terakhir, hal ini menjadi persoalan yang akan berdampak terhadap kestabilan sosial dan politik terutama pada isu keberagaman serta pendidikan. Ini dikarenakan

²⁶Convey, *About Us*, diakses melalui <https://Conveyindonesia.com/about-us/>, 11 Agustus 2018

²⁷Convey, *Request for Proposal: Fostering Tolerant Religious Education to Prevent Violent Extremism in Indonesia*, hlm. 1

paham radikalisme disebarkan melalui buku, pendidikan di sekolah, kampus, ceramah, dan media sosial. Permasalahan tersebut menjadi perhatian UNDP mengingat hal ini merupakan fokus UNDP dalam *Democratic Governance and Peace Building* yakni *Preventing Violent Extremism*. Untuk mengatasi permasalahan ini, UNDP bekerjasama dengan PPIM UIN Syarif Hidayatullah membentuk proyek Convey Indonesia, dimana program yang dijalankan oleh Convey diadaptasi dari strategi PVE UNDP. Pengimplementasian proyek Convey selama satu tahun tersebut dinyatakan berhasil dalam melaksanakan kegiatan pencegahan tindakan kekerasan ekstremisme yang lebih efektif, meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya tindakan kekerasan ekstrimisme dan peran komunitas pendidikan dalam mencegahnya.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, pertanyaan penelitian yang muncul adalah Bagaimana Upaya UNDP melalui Convey Indonesia Mengatasi Radikalisme Agama di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya UNDP melalui proyek Convey dalam mengatasi radikalisme agama di Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian berikutnya, terutama kajian Organisasi Internasional dan *peacebuilding*.

2. Secara Praksis penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat luas dalam memahami dan mengatasi intoleran dan radikalisme agama dalam kehidupan sosial dan politik.

1.6. Studi Pustaka

Penulis juga mengumpulkan dan menelaah beberapa tulisan sebagai studi pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Studi pustaka pertama adalah tulisan yang berjudul “Bahaya Radikalisme terhadap NKRI” yang ditulis oleh Nur Khamid.²⁸ Tulisan ini menjelaskan mengenai bagaimana ideologi Islam radikal menjadi ancaman terhadap ideologi Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ideologi ini sangat dipengaruhi oleh paham ISIS yang ideologinya terus dikembangkan ke seluruh dunia melalui situs-situs, buku, pendidikan di sekolah, kampus, ceramah, dan media sosial. Paham radikal pada umumnya muncul dikarenakan masyarakat tidak percaya dan puas terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik di dalam maupun luar negeri. Tulisan ini berkontribusi terhadap penelitian penulis dimana memberikan informasi dan pemahaman terkait ancaman yang dapat di hasilkan oleh radikalisme terhadap keberagaman dan dunia pendidikan.

Penelitian yang kedua, yaitu sebuah penelitian yang berjudul “*Peacebuilding amongst Christian and Muslim in Nigeria: A Critical Study of ‘A Model Of and For’ Religious Leaders as Peace Brokers*” oleh Umar Silas Labilam.²⁹ Dalam tulisan ini, menjelaskan tentang peran seharusnya dari pemimpin agama dalam menyelesaikan

²⁸ Nur Khamid, *Bahaya Radikalisme terhadap NKRI*, Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1, Juni 2016

²⁹ Umar Silas Labilam, *A Model Of and For Religious Leaders as Peace Brokers*, University of Stellenbosch, 2016

konflik. Kebanyakan konflik yang terjadi di Nigeria disebabkan oleh faktor agama. Penerapan *peacebuilding* yang dilakukan di sini dilakukan oleh pemerintah yang juga mendapat dukungan dari pihak internasional yakni dengan menyediakan ruang bersama bagi kelompok agama dan masyarakat untuk melakukan dialog antara agama yang bertujuan menimbulkan sikap saling memahami satu sama lain. Dalam tulisan ini yang membedakan dengan yang akan penulis teliti adalah keterlibatan UNDP sebagai aktor pelaksanaan yang dilakukan oleh organisasi terkait yang terkhusus pada dunia pendidikan dan generasi muda. Penekanan dalam tulisan ini lebih diutamakan pada pemimpin kelompok agama yang pada dasarnya memegang peran penting dalam mempengaruhi perilaku masyarakat pengikutnya.

Penelitian ketiga yaitu “*Alternative Education or Teaching Radicalism? New Literature on Islamic Education in Southeast Asia*” oleh Holger Warnk.³⁰ Penelitian ini membahas fenomena dari dinamika pendidikan agama Islam di beberapa negara kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini berfokus pada pembahasan penyebaran nilai-nilai keagamaan melalui kurikulum pendidikan dan institusi pendidikan itu sendiri, seperti halnya madrasah dan pondok pesantren yang menjadi objek kajian pada penelitian. Penelitian ini juga membahas beberapa perdebatan terkait kurikulum pendidikan antara pihak pemerintah dan pihak oposisi Islam. Kemudian, pada penelitian ini diberikan paparan mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran radikalisme pada institusi pendidikan, terkhusus di beberapa institusi pendidikan yang berbasis keagamaan di kawasan Asia

³⁰ Holger Warnk, *Alternative Education or Teaching Radicalism? New Literature on Islamic Education in Southeast Asia*, Journal of Current Southeast Asian Affairs, 28, 4, GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of Asian Studies and Hamburg University Press.

Tenggara. Penelitian ini berkontribusi terhadap penelitian penulis dimana diberikanya gambaran yang kompleks terkait penyebaran radikalisme melalui institusi pendidikan dan peran negara dalam melakukan pencegahan serta penanganan.

Studi pustaka ke empat bersumber dari penelitian yang berjudul “*How to Achieve Sustainable Peace: The Radical Potential of Implementing UN Sustainable Development Goal 16*” oleh Sarah Hearn.³¹ Penelitian ini menjelaskan bagaimana SDG’s goal 16 menjadi dasar setiap negara masyarakat internasional dalam berupaya melakukan pencegahan dan penanganan radikalisme yang masuk melalui penanaman nilai dan norma kepada masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menjabarkan tentang capaian yang ingin diperoleh melalui upaya membangun program efektif dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar angka radikalisme dapat ditekan semaksimal mungkin. Penelitian ini memberikan informasi terkait landasan berfikir awal yang menjadi alasan mengapa radikalisme merupakan permasalahan besar di dunia internasional. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana akhirnya penanganan radikalisme menjadi agenda penting UN (*United Nation*).

Studi pustaka terkait yang terakhir adalah penelitian yang berjudul “*The ‘Ambivalence of the Sacred’ in Africa: The Impact of Religion on Peace and Conflict in Sub-Saharan Africa*” oleh Matthias Basedau dan Alexander De Juan.³² Penelitian ini menjelaskan bagaimana faktor agama seringkali diabaikan dalam konflik yang terjadi di Afrika, namun pada kenyataannya faktor agama lebih sering terlibat dari

³¹ Sarah Hearn, *How to Achieve Sustainable Peace: The Radical Potential of Implementing UN Sustainable Development Goal 16*, Friedrich Eberto Stiftung

³² Matthias Basedau dan Alexander De Juan, *The ‘Ambivalence of the Sacred’ in Africa: The Impact of Religion on Peace and Conflict in Sub-Saharan Africa*, Hamburg: German Institute of Global and Area Studies (GIGA), 2008.

pada yang diasumsikan. Dalam konflik yang terjadi di Afrika, meskipun dapat dikatakan bahwa agama jarang menjadi inti konflik, namun agama memegang peran penting terhadap kemungkinan munculnya konflik dan konflik yang tengah berlangsung. Pengaruh identitas dan pemikiran agama dapat meredam konflik bahkan sebaliknya dapat memperburuk keadaan konflik itu sendiri, ini tergantung pada peranan pemimpin agama dalam konflik tersebut. Studi pustaka ini berkontribusi terhadap penelitian penulis dalam memahami dampak dari pemahaman nilai-nilai agama terkait alasan lahirnya sebuah konflik. Selain itu dengan jelas penelitian ini mengantarkan penulis terhadap logika berfikir dimana selain jalan untuk menciptakan perdamaian, nilai-nilai agama juga mampu menjadi pemicu sebuah konflik dan radikalisme.

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1. *Peacebuilding*

Konsep *Peacebuilding* pertama kali muncul melalui sebuah tulisan karya Johan Galtung yang berjudul *Peace, War and Defense*.³³ Dalam buku tersebut, Galtung menawarkan tiga model pendekatan dalam mencapai perdamaian, yaitu *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*. Ketiga pendekatan tersebut memiliki dimensi dan target tujuan masing-masing, seperti pada tabel berikut.

³³ Johan Galtung, *Peace, War and Defense*, Copenhagen: Ejlers, 1976, hlm. 282

Tabel 1.1
Kerangka resolusi konflik menurut Galtung

Masalah	Strategi	Target
Kekerasan	<i>Peacekeeping</i> (aktivitas militer)	Kelompok perjuangan atau para militer
Pertentangan kepentingan	<i>Peacemaking</i> (aktivitas politik)	Pemimpin/tokoh
Struktur sosial ekonomi dan sikap negatif	<i>Peacebuilding</i> (aktivitas sosial ekonomi)	Masyarakat umum (pengikut)

Sumber: IAIN Walisongo Mediation Center (IWMC)

Peacebuilding (The associative approach) adalah konsep yang pertama kali dicetuskan oleh Galtung sendiri. Pendekatan ini mencoba untuk menghubungkan kekerasan langsung dengan kekerasan struktural. Perang atau konflik yang terjadi kebanyakan adalah konflik vertikal, dimana kelompok minoritas (*dominated*) mencoba untuk membebaskan diri mereka dari dominasi, dan kelompok mayoritas (*dominating*). Kemudian konflik horizontal, dimana ini tidak dapat dianggap sebagai bentuk dominasi antar pihak namun sering kali dilihat sebagai reaksi atas dominasi internal dan dominasi eksternal. Disamping itu juga terdapat tipe ketiga, *the war in vacuum*, yakni perang atau konflik antar pihak yang tidak berhubungan, seperti pada masa kolonial perang dunia pertama, dimana konflik terjadi sebelum terbentuknya suatu kekuasaan atau dominasi secara resmi (*zero relationship*).

Konflik yang terjadi baik *vertical*, *zero*, atau *horizontal* tidak lepas dari relasi sosial yang ada dalam infrastruktur (*equity*, *entropy*, *symbiosis*, *broad scope*, serta *large domain*) dan supratruktur. *Equity* atau keadilan yang artinya tidak ada pihak yang di eksploitasi, *entropy* yakni keseimbangan interaksi yang tidak hanya dalam

lingkup pemerintah dan elit tapi juga *people to people, symbiosis* yaitu saling ketergantungan yang tinggi dalam masyarakat, kemudian *broad scope* yang berarti bentuk pertukaran yang tidak hanya ekonomi, kemudian yang terakhir *large domain* yakni pihak yang terlibat tidak hanya dua atau tiga namun lebih banyak. Kelima aspek tersebutlah yang mempengaruhi munculnya konflik.

Peacebuilding merupakan proses pengimplementasian perubahan atau rekonstruksi sosial, politik maupun ekonomi demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan dengan mengatasi akar penyebab konflik kekerasan. Perdamaian yang berkelanjutan maksudnya adalah hilangnya permusuhan antara kelompok yang bertikai, yang mana juga akan menciptakan suatu tatanan sosial yang baru, yang memungkinkan semua individu untuk menggunakan potensi mereka tanpa khawatir kelompok yang lain akan memulai peperangan kembali.³⁴ Fokus dalam proses *peacebuilding* adalah upaya untuk perubahan struktur dalam masyarakat yang menimbulkan ketidak-adilan, kecemburuan, kesenjangan dan kemiskinan.³⁵

Menurut Johan Galtung, *peacebuilding* merupakan proses pembentukan perdamaian yang tertuju pada implementasi praktis perubahan sosial secara damai melalui rekonstruksi dan pembangunan politik, sosial dan ekonomi. Lebih umumnya, struktur harus menemukan dan mengeliminasi penyebab konflik kemudian memberikan alternatif terhadap situasi konflik atau situasi yang berkemungkinan terjadi konflik.³⁶ Galtung lebih menekankan *peacebuilding* ini kepada proses jangka

³⁴ Martina Fischer, *Peacebuilding and Civil Society in Bosnia Herzegovina : Ten years after Dayton*, Berlin, 2006, hlm. 4

³⁵ Martina Fischer, hlm. 4

³⁶ Johan Galtung, *Peace, War and Defense*, Copenhagen: Ejlers, 1976, hlm. 298

panjang, penelusuran konflik dan penyelesaian akar konflik, mengubah pandangan-pandangan yang kontradiktif, serta memperkuat elemen yang dapat menghubungkan pihak yang bertikai dalam suatu formasi baru demi tercapainya *positive peace*.³⁷

Positive peace lebih menekankan kepada ketiadaan kekerasan struktural atau terciptanya keadilan sosial serta terbentuknya suasana harmoni dan damai. Sementara *negative peace* ketiadaan kekerasan fisik. Kondisi *negative peace* sama dengan *peacemaking*, yang dalam resolusi konflik bertujuan untuk menghilangkan ketegangan antara pihak yang berkonflik. Sementara dalam *peacebuilding* yang ingin diwujudkan adalah *positive peace* dengan menciptakan struktur dan institusi perdamaian berdasarkan pada keadilan, dan kerjasama, serta secara permanen mengatasi penyebab konflik dan menghindari berulangnya konflik.

Berdasarkan pemikiran Galtung, *peacebuilding* memiliki dua dimensi, yakni dimensi struktural dan kultural. Dimensi struktural merujuk pada eksternal, kondisi objektif sistem sosial. Sedangkan dimensi kultural merujuk pada internal, kondisi subjektif dari kolektifitas yang ada pada sistem sosial. Ketika masyarakat berbagi subjektifitas yang menjustifikasi dan melegitimasi ketidakadilan relasi *power* dalam struktur politik dan ekonomi, maka dikatakan terjadi kekerasan kultural (*cultural violence*).³⁸

³⁷ Hugh Miall, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama Dan Ras*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 65-68

³⁸ Daniel J. Christie, *Peacebuilding: Approaches to Social Justice, Peace, Conflict, and Violence: Peace Psychology for the 21st Century*, New Jersey: Prentice-Hall.

Berdasarkan pemikiran Johan Galtung, Berghof Foundation³⁹ mencoba menyimpulkan tiga dimensi peran aktor dalam proses *peacebuilding*, yaitu :

1. Mengubah struktural yang kontradiktif.

Mengubah struktural yang kontradiktif sangatlah penting untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Elemen terpenting dalam mengubah struktural yang kontradiktif adalah *state-building* dan langkah-langkah demokratisasi. Hal ini bisa dicapai melalui pemilu, memperbaiki sistem pendidikan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, keadilan sosial, penegakan hak asasi manusia dan pemberdayaan masyarakat sipil.

2. Meningkatkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik.

Meningkatkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik merupakan bagian integral dari *peacebuilding* untuk mengurangi efek dari sebuah konflik. Hal ini bisa dicapai dengan program-program rekonsiliasi, membangun kepercayaan, membangun kembali komunikasi yang sempat rusak antara pihak-pihak yang berkonflik.

3. Mengubah sikap dan perilaku individu.

Mengubah sikap dan perilaku individu ini berarti bentuk penguatan kapasitas perdamaian pada masing-masing individu. Hal ini bisa dicapai dengan memberdayakan individu yang sebelumnya terkesampingkan, pemulihan trauma dan luka psikologis, memberikan pekerjaan pada

³⁹ Berghof Foundation, *Berghof Glossary on Conflict Transformation: 20 notions for theory and practice*, Germany: Berghof Foundation Operations GmbH, 2012. Chapter 10, hlm. 62-64

mantan kombatan untuk meningkatkan kondisi perekonomian mereka sehingga merubah pandangan, sikap dan perilaku individu tersebut.

Ketiga indikator ini akan penulis gunakan sebagai alat analisis dalam menjabarkan upaya UNDP mengatasi radikalisme agama di Indonesia. Proses *peacebuilding* mencakup berbagai dimensi seperti sosial, politik, ekonomi dan internasional. *Peacebuilding* biasanya dilakukan oleh aktor internal seperti pemerintah, masyarakat dan LSM, namun tidak jarang juga dibutuhkan peran pihak eksternal seperti organisasi internasional, dan *international nongovernmental organizations* (INGO's) dalam memfasilitasi upaya *peacebuilding*.⁴⁰

Menanggapi permasalahan terorisme yang disebabkan radikalisme di Indonesia, UNDP berupaya mengatasi permasalahan ini dengan cara *peacebuilding*. Berdasarkan definisi Galtung mengenai *cultural violence*, yakni tindakan kekerasan secara langsung maupun struktural yang dijustifikasi atau dilegitimasi atas dasar aspek kultural yang ada seperti ideologi, agama, bahasa dan seni.⁴¹ Maka radikalisme dan intoleransi dapat dikategorikan sebagai *cultural violence*, yang artinya *peacebuilding* sangat dibutuhkan untuk menciptakan *positive peace* di lingkungan masyarakat.

Peacebuilding sangat diperlukan dalam mengatasi persoalan radikalisme agama di Indonesia karena hal ini akan berpengaruh terhadap potensi ancaman *cultural violence* yang dapat terjadi di masyarakat dan berujung konflik horizontal.

⁴⁰Hugh Miall, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelolakan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama Dan Ras*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 324.

⁴¹Johan Galtung, *Cultural Violence*, *Jurnal of Peace Research*, Vol. 27 No. 3, 1990, hlm. 291

Dampak dari konflik ini adalah ancaman terhadap demokrasi dalam politik dan ketimpangan ekonomi. Namun, dampak yang utama adalah persoalan perdamaian dalam keberagaman masyarakat Indonesia.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.⁴² Adapun proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna dari data yang telah didapatkan.⁴³ Dengan menggunakan metode penulisan deskriptif, peneliti mencoba menggambarkan bagaimana upaya UNDP melalui Convey dalam mengatasi radikalisme agama di Indonesia. Penggunaan metode penulisan deskriptif ditujukan agar dapat menggambarkan dan menyampaikan masalah yang diteliti secara cermat dan lengkap.

1.8.2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah upaya UNDP dalam mengatasi radikalisme agama di Indonesia dalam dunia pendidikan. Batasan waktu yang penulis gunakan untuk melihat upaya UNDP tersebut adalah dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Batasan waktu ini dipilih karena pada tahun 2017 hingga 2018 adalah rentang

⁴² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 4th Edition*, California: SAGE Publications, 2013, hlm. 4

⁴³ John W. Creswell, hlm. 4-5

waktu pelaksanaan proyek Convey yang dilakukan UNDP bekerjasama dengan PPIM UIN Syarif Hidayatullah.

1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis yaitu unit yang perilakunya akan dianalisis dan terpengaruh oleh berlakunya suatu pengetahuan. Unit analisis juga dikenal dengan variabel dependen.⁴⁴ Unit eksplanasi juga dikenal dengan variabel independen. Pada penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah UNDP, dengan unit eksplanasi pada penelitian ini adalah radikalisme agama di Indonesia. Sedangkan tingkat analisis dalam penelitian ini adalah negara Indonesia.

1.8.4. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dan merupakan alat bantu yang dipilih serta digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian akan digunakan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan, dan yang pada akhirnya akan dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan.⁴⁵ Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku, jurnal, catatan, artikel dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴⁶

⁴⁴ Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 43

⁴⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Depok: PT GRAFINDO PERSADA, 2014, hlm. 129

⁴⁶ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 93

Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, laporan, buku, dan jurnal serta sumber-sumber lain yang relevan.⁴⁷ Adapun sumber data dari penelitian ini adalah tiga laporan dari PPIM UIN Syarif Hidayatullah, lima laporan dari Convey, dua jurnal dari MAARIF *Institute*, serta artikel dari CSRC, IMCC, dan SFT UIN Syarif Hidayatullah. Selain itu penulis juga menggunakan jurnal Studi Islamika yang berjudul “Revitalisasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia” dan jurnal “Akar Radikalisme Keagamaan: Peran Aparat Negara, Pemimpin Agama dan Guru untuk Kerukunan Umat Beragama” karya Azyumardi Azra sebagai sumber jurnal utama. Penulis juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak Convey dan UNDP, namun upaya ini tidak mendapatkan data yang diharapkan.

1.8.5. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Penulis akan menjawab pertanyaan penelitian menggunakan konsep *peacebuilding* menurut Johan Galtung. Teknis analisis dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data-data mengenai upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh UNDP melalui Convey dalam mengatasi radikalisme agama di Indonesia. Kemudian penulis melihat apakah upaya UNDP melalui Convey dalam mengatasi radikalisme agama di Indonesia tersebut berhasil mencapai tiga tujuan utama dari *peacebuilding* menurut Galtung seperti yang dikemukakan oleh Berghof Foundation.

⁴⁷ Moh Nazir, hlm. 93

Dalam proses analisis, penulis melihat upaya yang dilakukan Convey pada setiap kegiatannya. Pada indikator merubah stuktur yang kontradiktif, penulis mencari upaya yang dilakukan Convey terkait advokasi dan riset yang kemudian penulis golongkan sebagai upaya merubah structural yang kontradiktif. Pada indikator kedua, yakni meningkatkan hubungan pihak yang berkonflik. Dalam konteks ini, penulis melihat upaya Convey dengan kata kunci rekonsiliasi yang kemudian penulis kategorikan sebagai upaya meningkatkan hubungan pihak yang berkonflik. Terakhir adalah mengubah sikap dan perilaku individu, pada indikator ini penulis mengkategorikan upaya Convey yang berkaitan dengan pemberdayaan sebagai bentuk upaya mengubah sikap dan perilaku individu.

1.8.6. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, konsep, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian.

BAB II : RADIKALISME AGAMA DALAM DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Bab ini berisi tentang radikalisme agama di Indonesia, penyebaran radikalisme agama di dunia pendidikan, dan dampak radikalisme terhadap dunia pendidikan dan keberagaman

BAB III : PERAN UNDP DALAM MENGATASI RADIKALISME AGAMA

Bab ini berisi tentang deskripsi UNDP dan program yang kemudian melahirkan Convey sebagai bentuk implementasi di tingkat nasional. Pada bab ini juga akan mendeskripsikan latar belakang, tujuan, dan program Convey di Indonesia.

BAB IV : ANALISIS UPAYA UNDP DALAM MENGATASI RADIKALISME AGAMA DI INDONESIA

Pada bab ini peneliti akan menggunakan konsep *peacebuilding* untuk memaparkan dan menganalisis upaya UNDP melalui Convey dalam mengatasi radikalisme agama di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan hasil dari penelitian.

